

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama adalah mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam kaitan ini, pemerintah terus berupaya agar pengelolaan wakaf itu mempunyai daya dukung yang kuat. Disamping itu, sebagai langkah kedepan perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika keumatan.

Peran berarti laku atau upaya, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹ Peran dari sebuah Lembaga Dakwah seperti halnya Kementerian Agama,

¹ (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854)

mempunyai kewajiban untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sempurna jika wakaf masih menimbulkan sengketa dikemudian hari, tapi harus dikelola dengan baik sebagaimana semestinya.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi (seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".²

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 435.395 lokasi dengan luas total 4.142.464.787,906 m² di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertipikat, sedangkan 32,78% belum bersertipikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat yang berpotensi sengketa di kemudian hari.³ Dalam konteks geografis di Kota Bandung, aset wakaf mencapai 520.789 m² di 2.901 lokasi, yang kebanyakan hanya dijadikan masjid, makam,

² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2006, hlm. 3.

³ 14273600KMA RI No. 39 Tahun 2015 - Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019. hlm. 12

mushola oleh nadzir tidak dikelola atau dikembangkan secara produktif sehingga kurang memberikan manfaat yang lebih berdampak luas terhadap masyarakat.⁴

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan Nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak Nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP No. 28/1977 serta peraturan pelaksanaannya, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sebaliknya, tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP No. 28/1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat data-data tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, mejadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Memang ada kendala kenapa tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut

⁴ Dari DATA BIMAS KEMENAG KOTA BANDUNG, diambil pada tanggal 4/10/2016 pukul 15.30 WIB.

karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada Nadzir perorangan maupun lembaga, khususnya pelaksanaan wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977.

Di samping faktor awal keengganan Wakif dalam pembuatan sertipikat wakaf, di lingkungan internal birokrasi sendiri, khususnya BPN terdapat beberapa kendala. Kendala utama adalah faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Agama.

Oleh Karena itu Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Bandung yang memiliki peran dan kedudukan strategis. Sebab, seksi ini dapat dikatakan sebagai “ujung tombak” Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 393 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012).

Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peran pemerintah khususnya Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dalam pengelolaan wakaf. Untuk inilah kemudian penulis ingin menuangkan kedalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung?

2. Bagaimana Program-program yang dilaksanakan Kementerian Agama Kota Bandung dalam Pengelolaan Tanah Wakaf?
3. Bagaimana Pembinaan Kementerian Agama terhadap Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana program-program yang dilaksanakan Kementerian Agama Kota Bandung dalam pengelolaan tanah wakaf.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan Kementerian Agama terhadap Nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya dalam pengelolaan wakaf.

1. Bagi Instansi adalah :
 - a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi catatan / koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.
 - b. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

2. Bagi lembaga pendidikan adalah :

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perwakafan.
- b. Sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan perusahaan / instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

3. Bagi pihak lain adalah :

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan mengenai wakaf.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil-hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, hal itu akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan sosial di bidang *tadbir* khususnya, dan dakwah Islam pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi Hafiddin dari Universitas Islam Bandung yang berjudul “Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Bandung ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf” skripsi ini menjelaskan bahwa Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia yang merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah lembaga wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara Islam, seperti Saudi Arabia,

Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain. hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf, peranan Nadzir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nadzirnya, karena Nadzir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh Wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Jadi tugas Nadzir tidak hanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk hal-hal yang konsumtif saja, yang dalam prakteknya terus membutuhkan dana tetapi tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nadzir seharusnya bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, sehingga harta benda wakaf dapat berkembang dari hasil pengelolaan harta benda wakaf itu sendiri, tidak harus mendapatkan dana suntikan dari masyarakat tersebut.

Jurnal M. Mahbub Junaidi Universitas Brawijaya yang berjudul “Efektifitas pensertipikatan tanah wakaf di kabupaten Pasuruan (studi di Departemen Agama kabupaten Pasuruan)” tesis ini menjelaskan bahwa wakaf tanah apabila ditinjau dari aspek sosial keIslaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan wakaf tanah yang tepat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial yang bisa dirasakan semua masyarakat. Namun praktek wakaf yang berjalan dalam masyarakat sekarang ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan belum jelas status hukumnya atau belum memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau disertipikatkan. Harapan pemerintah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum memang harus disertipikatkan. Pada dasarnya pemerintah harus sudah berupaya memenuhi harapan itu demi menertibkan aset wakaf semisal Instruksi Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI Tahun 2013 dimana tujuan instruksi tersebut untuk legalisasi tanah wakaf sehingga tercipta kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut.

Hasil penelitian hukum empiris sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dari pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan penulis menemukan adanya kendala dari obyek dan subyek dari sertipikasi tersebut. Obyek tanah wakaf di Kabupaten kebanyakan statusnya berdiri di atas tanah negara atau eigendom, hal inilah yang menjadi kendala proses sertipikasi tanah wakaf yang tujuannya untuk suatu kepastian hukum. Subyek yang diteliti terkait pemahaman pewakif dan nadzir penerima amanah wakaf yang masih tradisional sehingga terjadi ketidakefektifan atas peraturan dan pelaksanaan sertipikasi tanah wakaf. Faktor tingkat pendidikan formal nadzir mempengaruhi pemahaman nadzir atas hukum pertanahan nasional.

F. Kerangka Pemikiran

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtima'iyah) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.⁵

Eksistensi wakaf dalam instrument kehidupan Islam bisa dibilang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibandingkan dengan zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf / nadzir harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh, yang didistribusikan dalam manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (mauquf). Selanjutnya wakaf dapat dilihat lagi dari sisi nilai strategis mengenai pengelolaannya. Jika

⁵Kementrian Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm. 1

zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah.

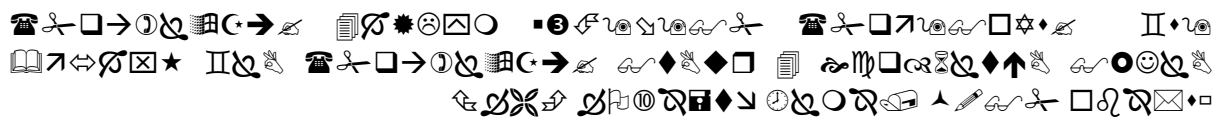
Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan / dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996 : 1-2).⁶

Islam adalah agama yang komprehensif melingkupi segala bidang, salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang dikaji dalam memahami lembaga itu yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta ijtihad para Mujtahid (2) Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (3) Wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama

⁶ Depdikbud, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar, (Jakarta : Depdikbud, 1995/1996), hlm. 1-2

dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: ⁷



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَآءٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surah Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَغْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مِمَّا مَوْلَى فِيهِ

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata yang artinya: “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Wahai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 2006, hlm. 12

⁸ Ibid., hlm. 13

perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Sedangkan dalil yang di kutip dari kitab wakaf (HPT Muhammadiyah, 2012 : 127)

menjelaskan bahwa: ⁹

تَصَدَّقَ بِبَعْضِ مَالِكَ وَفَقَّا لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ أَوْ اسْعَ فِي الْخُصُولِ عَلَى مَالٍ تَقْفُهُ (1) مُخْلِصًا نِيَّتَكَ لِلَّهِ (2) يَنْبُتُ لَكَ الْأَجْرُ الَّذِي لَا يَنْقُطُ (3) فَإِذَا وَقَفْتَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا حَقُّ مَنْ لَهُ الْإِثْنَاعُ بِهِ (4) فَلَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ (5) وَلَا تُقَيِّدُ وَفَقَكَ بِوَقْفٍ مَحْدُودٍ (6) وَلَكَ أَنْ تُخَصِّصَهُ لِشَخْصٍ أَوْ قَوْمٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ تَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ (7) وَلَا يَكُنْ وَفَقَكَ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ مَا تُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةَ (8) وَإِذَا وَصَّيْتَ بِوَقْفٍ مَالِكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَى الثَّلَاثِ (9) وَإِنْ كُنْتَ نَاطِرًا أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ لَجْنَةِ الْأَوْقَافِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْتَنِيَ بِهَا عَلَى قَصْدِ الْوَقْفِ وَتَنْصَرِفَ عَلَى وَجْهِهَا إِمْتِنَالًا لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَأَنْ تَسْتَدِيرَ مَنَافِعَهَا (10) مَتَى عَدِمَ نَفْعُ الْمُؤَقَّوفِ بِهِ لِنَحْوِ هَلَاكِ فَلَاكَ النَّصْرُفُ بِهِ فِيمَا يُمَاتِلُهُ أَوْ مَا يَشَابُهُهُ فِي النَّفْعِ. أَوْ يَبِيعُهُ أَوْ شَرَاءَ شَيْءٍ آخَرَ بِمَنْعِهِ اسْتِدَامَةً لِلْمُؤَقَّوفِ (11) وَإِذَا تَسَلَّمْتَ نُقُودًا لِلْأَوْقَافِ أَوْ أَصَبْتَ مَالَ الْوَقْفِ فَتَنْصَرِفَ فِيهَا بِكُلِّ رِعَايَتِكَ فِي الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ كَيْلًا تَكُونُ كَنْزًا مَلْعُونًا (12)، وَلَكَ فِي حِفْظِهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمُؤْنَةَ مِنْ مَخْصُوعَاتِهَا أَوْ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ (13).

Wakafkanlah sebagian barang milikmu yang berguna bagi umum, atau berusaha halah engkau mengadakan barang yang akan engkau wakafkan (1), dengan ikhlas niatmu karena Allah(2), dengan demikian akan tetaplah pahala yang tidak akan putus bagimu (3).

Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja(4), selanjutnya barang itu tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh diwariskan (5).

Maka janganlah engkau memberi batas waktu akan wakafmu itu (6), dan boleh engkau menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan atau masjid dan sebagainya mengingat maslahat-maslahatnya (7), begitu juga jangan mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah atau yang menimbulkan fitnah (8). Jangan berwasiat mewakafkan barang lebih dari sepertiga dari pada harta kekayaanmu (9).

Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadzir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang mewakaf, serta mempergunakan sebagaimana mestinya, dengan kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu (10).

Di mana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya (11).

Kalau engkau menerima uang untuk wakaf atau mendapati barang wakaf yang tidak tertentu, yang mewakaf (wakifnya) tidak menentukan, hendaklah engkau pergunakan sebagai

⁹http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf diakses pada tanggal 25/08/2016 pukul 06.30 WIB

‘amal jariyah yang sebaik-baiknya, jangan sampai benda-benda wakaf itu tertimbun menjadi kanaz (timbunan) yang terkutuk (12).

Kalau perlu, perongkosan dalam mengurus dan menjaga barang-barang wakaf itu diambilkan dari hasil yang didapat dari wakaf itu, atau diikhtiarkan sumber bantuan lainnya (13).

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf, Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

¹⁰ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tercantum dalam pasal 1 yaitu :¹¹

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
8. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

¹¹ Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, *Himpunan Peraturan / Dasar Hukum Wakaf*, (Bandung, Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bandung, 2015), hlm. 1-2.

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infak dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma ideologis dan paradigma sosial-ekonomis.¹²

Pertama, paradigma ideologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik). Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang (QS: 9 : 103).

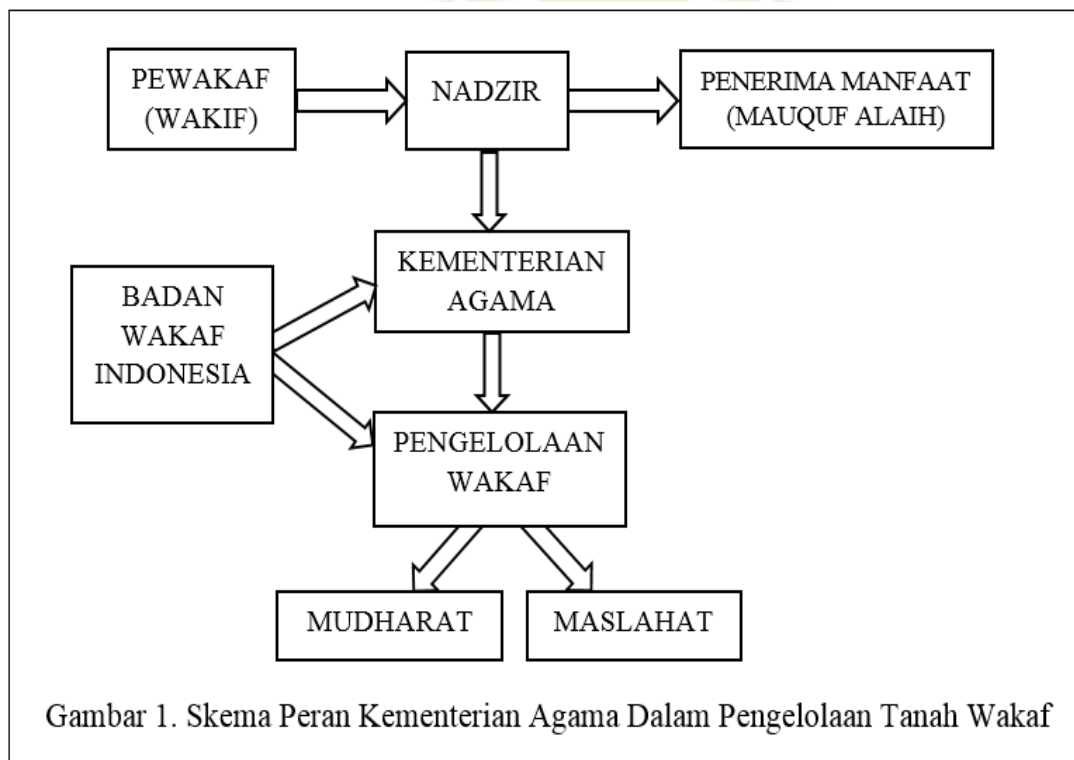
Kedua, landasan paradigma sosial-ekonomis. Setelah memiliki landasan ideologis yang bersumber pada kalimat tauhid (*la ilaaha illallah*), wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Apabila dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial ekonomis) masyarakat.

Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial sebagai virus (penyakit) masyarakat yang berisiko sangat tinggi. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri,

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 45

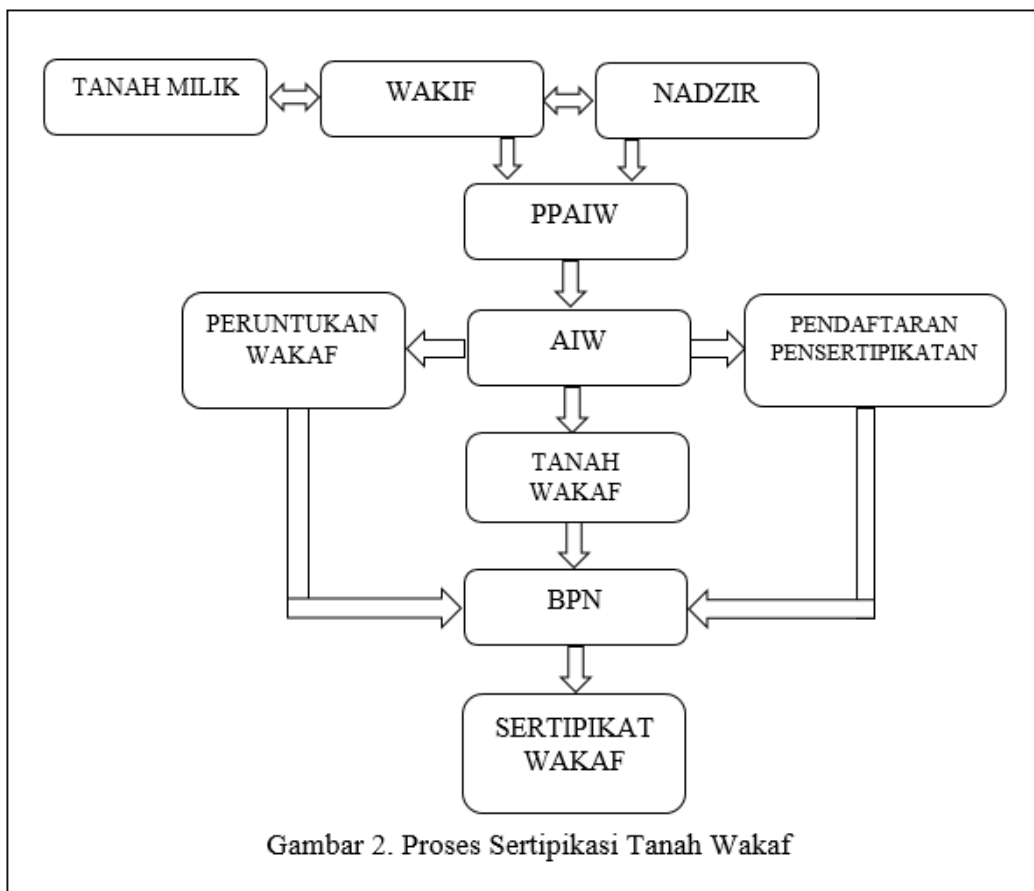
melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam itu melarang orang untuk menjadi kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (kekayaan dunia). Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga-lembaga lainnya.

Adapun Alur dari kerangka pemikiran dapat diuraikan dalam skema berikut :



Penjelasan skema diatas yaitu wakif mewakafkan harta benda miliknya kepada nadzir perseorangan ataupun nadzir organisasi. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola atau dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir mendaftarkan diri melalui KUA setempat atau Kementerian Agama untuk dibimbing dan mendapat pembinaan. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan (pendataan administasi) wakaf dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian oleh nadzir dikelola dan disalurkan

kepada mauquf alaih atau penerima manfaat. Untuk perkembangan wakaf di Indonesia dipantau langsung oleh Badan Wakaf Indonesia apakah wakaf itu maslahat atau mudharat.



Sedangkan penjelasan skema selanjutnya yakni wakif memiliki sebidang tanah untuk diwakafkan kepada nadzir. Kemudian Wakif dan Nadzir mendatangi Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti pernyataan kehendak wakif yang telah mewakafkan harta benda miliknya kepada nadzir. Oleh nadzir tanah wakaf tersebut didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertipikat tanah wakaf supaya tidak ada sengketa dikemudian hari dan bisa dikelola juga dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 498 Bandung. Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan lokasi penelitian yaitu dapat diteliti secara ilmiah, data dapat diperoleh dengan mudah, dan lokasi terhitung mudah dijangkau. Kemudian peran Kementerian Agama Kota Bandung sebagai pelaku lembaga dakwah dapat menjadi percontohan dan inspirasi untuk lembaga-lembaga lain terkait dengan pengelolaan tanah wakaf.

2) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara luas.¹³ Adapun pendapat lain menyatakan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kajadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁴ Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung dalam pengelolaan tanah wakaf melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam memperoleh data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

3) Jenis Data

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABE, 2005), hlm 21.

¹⁴ Arikunto Suharimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 30.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵ Pada penelitian kualitatif, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya.¹⁶

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan menjadi yaitu :

- a. Data mengenai sertipikasi tanah wakaf
- b. Data mengenai program-program Kementerian Agama Kantor Kota Bandung dalam pengelolaan wakaf
- c. Data mengenai kegiatan pembinaan terhadap Nadzir yang dilakukan Kementerian Agama di Kota Bandung.

4) Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

¹⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4-11

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Adapun subyek penelitian, antara lain : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Pelaksana pengelolaan Wakaf.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.¹⁷ Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, Ad/ART, struktur organisasi serta program kerja yang terdapat pada Kementerian Agama Kantor Kota Bandung ataupun hal-hal yang dapat melengkapi jenis data yang diperoleh dalam penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis pun melakukan teknik-teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Observasi juga merupakan teknik yang dilakukan melalui pengamatan, pengawasan, peninjauan dan penyelidikan langsung akan kondisi objek untuk mengumpulkan data-data.¹⁹ Dalam

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 113

¹⁸ Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm 54.

¹⁹ Widodoo, *Kamus Ilmiah populer dilengkapi ejaan yang disempurnakan dan pembentukan istilah*, (Yogyakarta : Absolut, 2001), hlm. 553.

pelaksanaan observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi pusat penelitian, agar mengetahui secara langsung aktivitas Kementerian Agama Kota Bandung khususnya pada pengelolaan wakaf. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana peran pembinaan nadzir di Kementerian Agama Kota Bandung.

b. Interview (wawancara)

Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, sumber informasi (interview) menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan.²⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Semua responden yang diwawancarai diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata urutan secara uniform. Di samping itu sebagai bentuk pertanyaannya, digunakan wawancara terbuka terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan diberi kebebasan untuk menjawabnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana Wakaf yaitu Bapak Agus Saleh, S.Ag dan Bapak Dedi Dulkarnaen, S.Pd selaku Direktori Wakaf.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

²⁰ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 3*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 218.

rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²¹ Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak tanah wakaf yang ada di kota Bandung, yang berupa akta ikrar wakaf dari PPAIW ataupun yang sudah bersertipikat.

6) Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;
- c. Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan;
- d. Kemudian dianalisis;
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori pengelolaan.

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 218



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG